

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016)

Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Tahun dasar ini dilakukan perubahan karena selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan baik tatanan global maupun lokal yang berpengaruh pada perekonomian nasional.

PDRB tahun dasar 2010 ini mengacu pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008. SNN 2008 merupakan rekomendasi internasional mengenai bagaimana penyusunan ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang mana didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi.

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.
- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.

- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- c. Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas merupakan metode langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak langsungnya dalam menghitung angka-angka PDRB. Metode tidak

langsung merupakan metode penghitungan alokasi yakni dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun sebaliknya yakni PDRB provinsi menjadi PDRB kabupatena atau kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator. (Sukirno, 2000)

Metode alokasi ini terkadang terpaksa dipakai dalam memperkirakan data provinsi serta kabupaten atau kota untuk jenis kegiatan tertentu yang mana memiliki sistem pelaporan terpusat atau cabang usaha yang memiliki kantor pusat di daerah lain. (Pertwi, 2016)

Dalam menghitung angka-angka PDRB menggunakan metode tidak langsung ini alokator yang dapat dipakai didasarkan pada (1) Nilai produksi, (2) Jumlah produksi, (3) Tenaga kerja, (4) Penduduk, (5) Alokator lainnya yang dianggap sesuai dengan daerah tersebut.

PDRB atas dasar harga konstan bermanfaat dalam perencanaan ekonomi, proyeksi serta menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun per lapangan usaha.

PDRB atas dasar harga konstan dapat pula mencerminkan kuantum produksi pada tahun berjalan yang dinilai berdasarkan pada tahun dasar. Menurut BPS (2014) PDRB atas dasar harga konstan ini dapat dihitung dengan beberapa metode sebagai berikut, yakni:

a. Revaluasi

Revaluasi merupakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga tahun dasar dengan rumus berikut:

$$O_{kt} = P_t \times H_o$$

$$NTB_{kt} = O_{kt} - K_{kt}$$

Dimana :

O_{kt} = output konstan tahun berjalan

NTB_{kt} = nilai tambah bruto konstan tahun berjalan

P_t = produksi barang/jasa tahun berjalan

H_o = harga barang/jasa tahun dasar

K_{kt} = konsumsi antara konstan tahun berjalan

b. Ekstrapolasi

Ekstrapolasi merupakan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan mengalikan nilai tahun dasar dengan suatu indeks produksi, yakni sebagai berikut:

$$O_{kt} = O_{ko} \times IP_t$$

$$NTB_{kt} = O_{kt} - K_{kt}$$

Dimana :

O_{kt} = output konstan tahun berjalan

O_{ko} = output konstan tahun dasar

NTB_{kt} = nilai tambah bruto konstan tahun berjalan

IP_t = indeks produksi barang/jasa tahun berjalan

K_{kt} = konsumsi antara konstan tahun berjalan

c. Deflasi

Deflasi merupakan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan cara membagi nilai tahun berjalan dengan suatu indeks harga sebagai berikut:

$$NTB_{bt} = O_{bt} - K_{bt}$$

$$NTB_{kt} = NTB_{bt} : IH_t$$

Dimana:

O_{bt} = output berlaku tahun dasar

NTB_{bt} = output berlaku tahun berjalan

NTB_{kt} = nilai tambah bruto konstan tahun berjalan

IH_t = indeks harga barang/jasa tahun berjalan

d. Double Deflasi

Double deflasi merupakan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan ini dengan cara memisahkan perkiraan atas dasar harga konstan untuk nilai produksi dan konsumsi.

$$O_{kt} = O_{bt} : IH_t$$

$$K_{kt} = K_{bt} : IH_t$$

$$NTB_{kt} = O_{kt} - K_{kt}$$

Dimana :

O_{bt} = output berlaku tahun berjalan

O_{kt} = output konstan tahun berjalan

NTB_{bt} = nilai tambah bruto berlaku tahun berjalan

NTB_{kt}	= nilai tambah nruto konstan tahun berjalan
IH_t	= indeks harga barang/jasa tahun berjalan
K_{bt}	= konsumsi antara berlaku tahun berjalan
K_{kt}	= konsumsi antara konstan tahun berjalan

Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha serta kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dengan cara melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Pada akhirnya pembangunan ekonomoi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, diiringi dengan tingkat pemerataan yang baik. (Pertiwi, 2016)

Beberapa definisi kunci mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah sebagai berikut :

a. Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta

dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antardaerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah atau gaji, bunga, dividen dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional (Sukirno, 2000).

b. Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik atau regional dapat merupakan provinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen) (Robinson, 2004).

c. Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen (BPS, 2012).

d. Residen dan Non-Residen

Unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai atau melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga nirlaba tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun)(Sukirno, 2000).

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar (Sanusi, 1987).

f. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto dan bruto ialah karena pada konsep bruto, penyusutan masih termasuk didalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi PDRB

atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud diatas (Sukirno, 2000).

g. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar adalah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar

dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah PDRN atas dasar biaya faktor (Suryono, 2010).

h. Pendapatan Per Kapita

Apabila pendapatan Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu nilai yang disebut pendapatan per kapita. (Suryono, 2010)

2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB

Dalam kebijakan desentralisasi fiskal, salah satu tujuan utamanya ialah untuk menciptakan suatu kemandirian daerah dalam mendorong pembangunan ekonominya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat (UU No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut, terkhusus melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila PAD mengalami peningkatan yang cukup besar maka ini akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh daerah juga akan semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa akan meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga ini akan membuat daerah semakin berinisiatif dalam menggali potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. (Sidik 2002, dalam Pertiwi 2016)

3. Hubungan Investasi dengan PDRB

Suatu kegiatan investasi akan memungkinkan suatu masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional serta meningkatkan taraf kehidupan

yang lebih makmur. Peran tersebut berasal dari tiga fungsi penting suatu kegiatan investasi, yaitu (1) investasi adalah suatu bagian dari pengeluaran agregat, maka akhirnya kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional dan kesempatan kerja yang lebih luas, (2) investasi akan mengakibatkan penambahan barang modal sehingga ini nanti akan menambah kapasitas produksi, (3) investasi akan selalu diiringi dengan perkembangan teknologi. (Sukirno, 2000)

Suatu akumulasi modal akan berhasil jikalau proporsi atau bagian dari pendapatan yang ada ditabung serta diinvestasikan dengan tujuan untuk memperbesar produk (output) serta pendapatan pada periode yang akan datang. Dalam proses membangun, seyogyanya mengalihkan sumber-sumber yang bersal dari sisi konsumsi kemudian selanjutnya mengalihkannya sebagai investasi dalam bentuk "*capital formation*" guna mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, investasi akan mampu meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya menjadi tenaga ahli yang terampil serta mampu memperlancar kegiatan yang produktif. (Todaro, 1981)

Dornbusch dan Fischer berpendapat bahwa investasi merupakan suatu permintaan barang dan jasa dengan tujuan untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi serta pendapatan pada periode yang akan datang.

Semakin besar investasi pemerintah pada barang publik maka nantinya diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga,

kemudian hal ini akan dapat mengalokasikan sumber daya yang ada di daerah, sehingga akhirnya akan meningkatkan PDRB daerah.

4. Hubungan Tenaga Kerja dengan PDRB

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) merupakan salah satu faktor positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. jumlah tenaga kerja yang lebih banyak atau lebih besar dapat meningkatkan tingkat produksi, serta pertumbuhan penduduk yang lebih besar maka ukuran pasar domestiknya juga lebih besar. Walau demikian, hal ini masih dipertanyakan.

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2002).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) dalam Putri dan Poerwono (2013) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input

tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Suatu kesempatan kerja akan tercipta ketika terjadi permintaan akan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang besar dalam jangka pendek bergantung pada besarnya efektifitas permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan substitusi antara tenaga kerja serta faktor produksi yang lain, elastisitas permintaan akan hasil produksi, dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya. (Suryono, 2010)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi. (Suryono, 2010)

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting

karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya.

5. Hubungan Inflasi dengan PDRB

Inflasi secara umum merupakan suatu keadaan dimana perekonomian menunjukkan adanya kecenderungan dalam kenaikan tingkat harga secara umum atau secara bersama-sama. Inflasi tidak semuanya berdampak negatif pada perekonomian. Utamanya apabila terjadi inflasi ringan yakni inflasi dibawah 10%, inflasi ringan ini justru nantinya dapat mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian. Hal ini dikarenakan inflasi akan mampu memberi semangat bagi pengusaha untuk lebih dapat meningkatkan produksinya. Selain itu pengusaha akan lebih bersemangat untuk memperluas produksinya, hal ini terjadi karena ketika terjadi kenaikan harga maka pengusaha akan mendapat lebih banyak keuntungan. Peningkatan produksi ini juga akan memberi dampak positif lain yakni tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi dikatakan dapat berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%. (Mankiw, 2003)

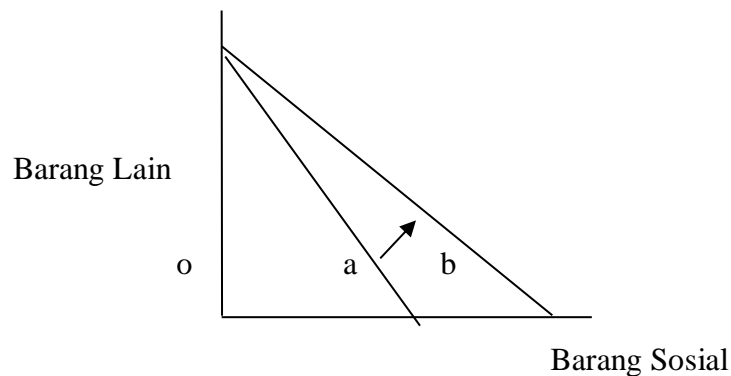
6. Hubungan Belanja Daerah dengan PDRB

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mana suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional serta APBD untuk daerah atau regional. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal ialah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat

output maupun kesempatan kerja serta memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

Pengeluaran pemerintah yakni berupa pembayaran subsidi ataupun bantuan langsung pada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan dengan dua cara yang terpisah, yakni pertama melalui pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang itu merupakan bagian dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer berpengaruh terhadap hubungan antara output serta pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah merupakan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. (Dornbusch dan Fisher, 1999) menegaskan bahwa perubahan dalam hal pengeluaran pemerintah serta pajak nantinya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan suatu kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Apabila perekonomian berada dalam resesi, maka pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan, ini berguna untuk menaikkan output. Namun ketika berada pada masa makmur (*booming*) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi untuk dapat kembali pada penggunaan tenaga kerja penuh.

Berdasarkan teori, efek pengeluaran pemerintah jikalau dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber : Sukirno (2000)

Gambar 2.1.

Perubahan Budget Line karena Adanya Pengeluaran Pemerintah

Awalnya dengan anggaran tertentu yakni pada area konsumsi yang berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang sosial, misal : subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergerak ke kanan yakni garis AC, sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah ini mampu memperluas pilihan manusia.

Ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka akan menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah, hal ini dikarenakan peningkatan agregat demand akan mampu mendorong kenaikan investasi, kemudian akhirnya akan meningkatkan produksi.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB telah banyak dilakukan, antara lain:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Alat Analisis	Hasil Penelitian
			Bebas	Terikat		
1.	Hera Pradipta Putri, Dwisetia Puerwono (2013)	Faktor Internal dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010	PDRB atas dasar harga konstan 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah • Investasi swasta • Indeks Harga Konsumen • PDRB Provinsi Jawa Barat • PDRB Provinsi Jawa Timur 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pengaruh faktor eksternal (PDRB Provinsi Jabar dan Jatim) • Variabel investasi merupakan faktor internal PDRB Jawa Tengah
2.	Yozi Aulia Rahman, Ayunda Lintang Chamelia (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012	PDRB Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan • Kredit • PAD • Belanja Daerah 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB • Variabel Tabungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB • Variabel kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB • PAD memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap PDRB
3.	Wiratno Bagus Suryono	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,	PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • PAD • Investasi • Tenaga Kerja 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel PAD berpengaruh terhadap PDRB • Variabel Investasi berpengaruh terhadap PDRB

		Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah				<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB
4.	Timotheus Dionisius	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Provinsi NTT Tahun 1991-2010	PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja • Pengeluaran Pemerintah • Kredit Investasi 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) • Pertumbuhan kredit investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai • Pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan kredit investasi serta pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama (secara simultan) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Manggarai.
5.	Fitrah afrizal	Analisis Pengaruh	PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • PMDN • PMA 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel penelitian Penanaman Modal Dalam

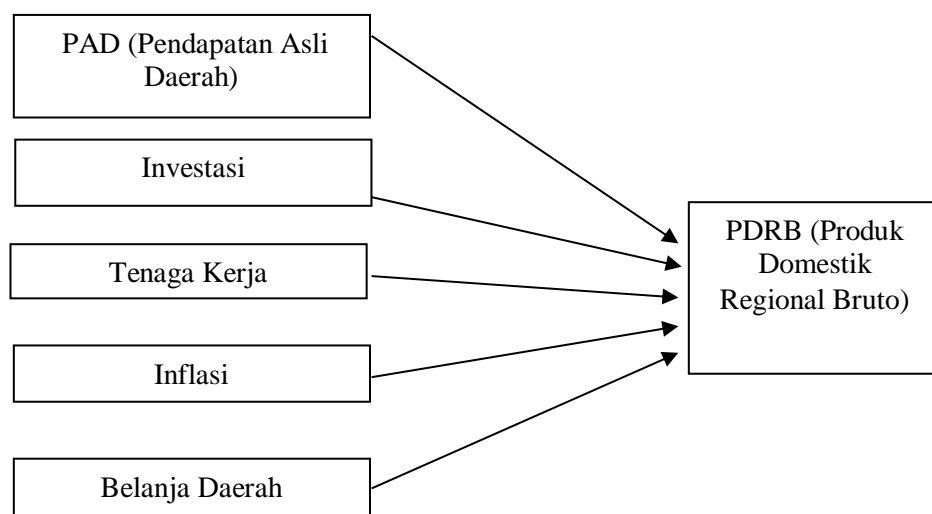
		Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011		<ul style="list-style-type: none">• Belanja Pemerintah• Tenaga Kerja		Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Pemerintah serta Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan
--	--	--	--	---	--	---

1. Hera Pradipta Putri, Dwisetia Puerwono (2013) dalam penelitian yang berjudul “Faktor Internal dan Faktor Eksternal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2010”, ingin menerangkan bahwa Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah yang meningkat hendaknya lebih didukung dengan peningkatan Tabungan, Posisi Kredit, Realisasi Pendapatan Asli Daerah karena keempat variabel tersebut berhubungan positif terhadap PDRB Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah.
2. Yozi Aulia Rahman, Ayunda Lintang Chamelia (2015) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten atau Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa secara simultan Tabungan, Kredit, PAD, dan Belanja Publik berpengaruh positif terhadap PDRB di Jawa Tengah.
3. Wiratno Bagus Suryono, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa secara bersama sama variabel PAD, Tingkat Investasi serta Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di Jawa Tengah.
4. Timotheus Dionisius, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Provinsi NTT Tahun 1991-2010”, dijelaskan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Manggarai, pertumbuhan kredit investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai, dan pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan kredit investasi serta pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama (secara simultan) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kabupaten Manggarai.

5. Fitrah afrizal, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa variabel penelitian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Belanja Pemerintah serta Tenaga Kerja secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Model Penelitian



Sumber : Suryono (2010)

D. Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian maka disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini nantinya akan diuji kebenarannya dan hasil ujinya ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis dapat juga disebut sebagai konklusi yang sifatnya sementara. Berdasarkan masalah diatas maka dapat diambil hipotesa sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah diduga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
2. Variabel Investasi diduga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
3. Variabel Tenaga Kerja diduga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
4. Variabel Inflasi diduga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015
5. Variabel Belanja Daerah diduga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah pada tahun 1985-2015

